

BAB III

KEADAAN UMAT ISLAM DALAM PEMILIHAN UMUM PERTAMA

A. Pemilihan Umum dan Aspirasi Partai

Sebagaimana dalam pembahasan yang awal, di sebutkan bahwa dalam pemilihan umum pertama di Indonesia ini merupakan satu-satunya Pemilihan Umum yang telah tercatat dalam sejarah bangsa Indonesia dengan banyaknya partai (konstenta) yang ikut di dalamnya, sebelum lebih jauh di bahas tentang partai-partai yang ada baik partai Islam maupun yang lainnya ada baiknya jika di bahas pula apa yang di maksud dari kata-kata Pemilihan Umum dan Aspirasi Partai itu sendiri.

Sebagaimana dalam bab awal telah di jelaskan bahwa Pemilihan Umum adalah pemberian suara yang diatur guna menduduki jabatan tertentu. Dari ungkapan tersebut maka dapat diambil pengertian bahwa Pemilihan Umum adalah Alat untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.³⁸ Jadi Pemilihan Umum adalah hanyalah merupakan alat yang menjadi penyempurna dari alat yang ada.

Dan yang dimaksud dengan Aspirasi itu sendiri adalah Gairah (keinginan, Harapan yang keras).³⁹ Sedangkan yang dimaksud dari fasal ini adalah keinginan

³⁸ Herbert Feith, Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965, LP3ES, Hal.62.

³⁹ WJS.Poerwodarminto, Op Cit, Hal.62.

an dari pada partai-partai yang ada pada masa itu ,
untuk mencari dukungan dari massa. Dalam melancarkan
tujuan politik dari partai itu sendiri, pada dasar-
nya mereka menginginkan kursi pemerintahan dan jatuh
pada organisasinya.

Sebelum Pemilihan Umum yang pertama di Indonesia dilaksanakan 29 September 1955, tidak kurang dari 6 buah kabinet yang mencantumkan Aktifitas politik tersebut dalam programnya, yaitu kabinet RIS, yang berkuasa sejak 20 Desember 1949 sampai 6 September 1950. Dan pemerintahan yang berhasil melaksanakan Pemilihan Umum adalah pemerintahan Dewan Menteri yang di pimpin oleh Boerhanuddin Harrahap.

Kalau di perhatikan situasi politik di masa itu, bahwa Pemilihan Umum dapat terlaksana dengan baik maka dapat diperoleh pemahaman bahwa baik perencanaan maupun pelaksanaan memerlukan prasyarat dasar tertentu dan pemerintah baru dapat merencanakan Pemilihan Umum setelah masalah Dasar tentang keberadaan negara sudah terselesaikan dalam bentuk pengakuan kedaulatan dari negara lain.

diketahui pula bahwa Pemilihan Umum dapat mengakibatkan timbulnya perubahan politik di samping dapat mengukuhkan sistim yang sedang berjalan. Dan supaya perubahan yang di bawah oleh Pemilihan Umum berjalan secara damai dalam artian perubahan yang

Pemerintah atau eksekutif yang berkuasa di tentukan kabinet karena parlemen terdiri dari wakil-wakil partai.

Maka kekuasaan yang begitu besar langsung mencerminkan pengaruh partai-partai politik di dalamnya, kekuasaan parlemen yang dominan berarti sama atau sejalan dengan peranan utama partai-partai politik di dalam sistim politik yang berlaku.

Kalau melihat kembali kemasa ini (Liberal) ,
maka dapat di temui bahwa masa ini merupakan masa
yang menjadi cacatan sejarah bangsa Indonesia yang
mana pada masa Liberal ini tidak kurang dari 28 par-
tai politik yang berdiri . Baik dari kalangan Islam,
Nasionalis dan Marxisme/Sosialisme, semuanya bertu-
juan mencari kedudukan yang mantap secara Idiologis
dalam RI.

Pada umumnya tujuan dari partai-partai politik dalam dunia pemerintahan, tidak lain hanyalah mencari pengaruh yang bisa menjadikan mati dan hidupnya partai. Bersamaan dengan itu semakin pesatnya perubahan masyarakat dan nilai-nilai sosial, banyak anggota masyarakat terutama kaum muda mendapat pendidikan modern, saling mencari jawaban berdasarkan Ideologi masing-masing sebagian berupa kepercayaan-kepercayaan baru dan lebih khusus berupa alasan-alasan yang kuat untuk menjawab tantangan yang

diajukan oleh kepercayaan-kepercayaan yang mereka warisi dari keluarga serta kelompok-kelompok mereka.

Dalam periode ini mereka dapat menjumpainya dalam partai-partai politik yang ada. Dari keadaan sosial yang semakin hari bertambah berubah, maka dari kalangan partai-partai politik dalam upaya menarik anggota-anggotanya serta pengikut agar mereka terutama yang muda tidak lari kepartai lain. Mereka menyendiakan jawaban bagi masalah-masalah Idiologi politik yang sedang mereka hadapi dengan jalan memberikan gambaran yang masuk akal mengenai nilai-nilai yang patut di pertahankan.

Di samping keuntungan yang di peroleh dari hubungan persaudaraan dan kegiatan kolektif serta kesempatan untuk berhubungan dengan orang-orang yang berpengaruh, serta kesempatan untuk mencapai kemajuan pribadi menjadi bagian tugas dari tugas pemimpin partai politik dalam usaha merumuskan Idiologi yang layak. Menguraikan posisi partai dengan cara mengaitkan mereka secara mantap dengan nilai-nilai dan persepsi-persepsi lama yang bertujuan untuk menjaga ketentraman dan keyakinan serta memberikan pengarahan kepada pemikiran orang.⁴²

Sebagaimana dalam pembahasan yang ada, pada fasal-fasal awal bahwa dari sekian banyak partai yang ada setelah kemerdekaan. Antara lain : Islam (Masyumi), Nasionalis (PNI) dan Marxisme/Sosialisme (PKI) dari ketiga partai yang ada, partai yang paling berperan dan dominan adalah PNI dan Masyumi. Hal ini dapat di lihat pada kedudukan yang diraih dari kedua partai tersebut, selama duduk dalam kursi kepemimpinan dalam pemerintahan.

Di lihat dari sistim yang di lakukan kedua partai ini, pada mulanya tampak berkembang suatu kerja sama yang cukup baik antara kedua kekuatan utama dalam parlemen, yaitu antara Partai Nasionalis Indonesia (PNI) dan partai Islam (Masyumi) yang memungkinkan untuk bersama-sama memimpin pemerintahan.

Walaupun kabinet mereka berkoalisi tetapi sering berganti, biasanya koalisi yang mereka pimpin itu di dukung pula oleh sebuah kekuatan menengah di dalam parlemen, yaitu partai sosial Indonesia (PSI), dan beberapa partai kecil seperti partai Katholik dan partai Kristen Indonesia (Parkindo).⁴³

Melihat situasi yang ada, baik dalam lingkungan pemerintahan yang berbetuk Liberal maupun sistim kepartaian dari berbagai partai politik yang ada sangat berperan secara aktif baik dari lingkungan

Di tinjau dari jatah pembagian kursi di dalam kabinet sebagaimana dalam fasal awal di sebutkan, pola koalisi PNI-NU ini terang menguntungkan partai tersebut, antara lain karena mereka tidak perlu memberi jatah kepada PKI yang secara sukarela mendukung mereka di parlemen. Di tinjau dari segi PKI sendiri sumbangan kepada pola koalisi PNI-NU telah menghasilkan tersingkirnya dua lawan politik utamanya Masyumi dan PSI tersebut, secara politik partai komunis Indonesia memperoleh kemenangan dengan terisolirnya Masyumi dan PSI dari pusat kekuasaan.

Dan kenyataan kedua partai kanan yang disebut terakhir ini menemukan diri mereka mengalami kekalahan politik yang cukup pahit. Secara keseluruhan kalau pola koalisi PNI-Masyumi secara menguntungkan posisi kekuatan kaum kiri di samping keuntungan yang di peroleh kaum tengah sendiri yang memimpin kabinet.

Walaupun beberapa bulan sebelum pemilihan umum pertama koalisi PNI-NU berhasil di jatuhkan dan di ganti dengan sebuah kabinet baru yaitu kabinet Boerhanuddin Harrahap. Inti kabinet ini terdiri atas koalisi PSI-NU-Masyumi, di tambah dengan partai kecil seperti partai katholik, Parkindo, dan PSII, namun taktik politik partai komunis Indonesia selama itu rupanya sudah terlalu jauh untuk dapat di bendung lawan-lawannya yang utama yaitu Masyumi dan PSI.

Nahdlatul Ulama' maupun Masyumi haruslah . . . senantiasa
awas dan waspada dalam menghadapi partai . . . Komunis
Indonesia yang bersorak sorai melihat keluarnya NU
dari Masyumi dan dengan perpecahan itu mereka jadi-
kan provokasi untuk memecah belah persatuan Umat
Islam.

Dan masa inilah merupakan masa puncak perpeca-
han dalam tubuh Umat Islam yang selama ini bekerja
sama dalam mempertahankan persatuan Umat, Kemerdeka-
an, Soal Sosial dan sebagainya. Sebagaimana partai-
partai politik yang ada kalangan Umat Islam juga
mengadakankampanye dalam menghadapi pemilihan umum
yang paling terlihat dalam berkampanye . . . adalah
Nahdlatul Ulama'.

Pemisahan diri dari tubuh Masyumi . . . mendorong
untuk semangat dalam berkampanye bagi Nahdlatul Ula-
ma'. Hal ini merupakan kesempatan yang baik bagi ka-
langan NU , maka kesempatan yang baik itu tidak di
sia-siakan oleh PB NU mereka mengadakan ~~perjalanan~~
keliling ke daerah-daerah seluruh Indonesia. . . pada
saat itu PB Nahdlatul Ulama' terdiri dari Idham Kha-
lid, Zainul Arifin, Masjkur yang mengadakan turne ke-
Jawa Barat dengan alasan menanamkan Idiologi partai
yang lebih mendalam pada anggota-anggotanya, tetapi
dalam prakteknya mereka mempersiapkan kaum Nahdiyyin
agar waspada dalam menghadapi Pemilihan umum ini.

Pada waktu itu juga sudah di sinyalir adanya pegawai negeri terutama yang menyalagunakan kedudukan. Mereka melakukan kampanye untuk golongannya dengan menggunakan fasilitas pemerintah atau menggunakan wewenang yang ada padanya untuk memaksa rakyat memilih golongannya. Hal demikian itu di sinyalir oleh konsul PB NU Jawa Tengah K.H. Abd Kholik yang berkirim kawat kepada pimpinan partai di Jakarta agar mendesak pemerintah supaya semua pejabat negara terutama pamong Praja di larang menggunakan jabatan dan pengaruhnya buat sesuatu golongan, karena jika hal itu berlangsung terus maka Demokrasi yang terwujud di tanah air kita nanti merupakan Demokrasi tidak sehat.

Dalam kenyataan konstantan pemilihan umum memang mempergunakan berbagai daya upaya agar berhasil mengumpulkan suara yang sebanyak-banyaknya untuk mendukung partainya. Daya upaya itu ada yang dilakukan secara halal dan ada pula yang licik, licin seperti halnya yang dilakukan oleh Partai Komunis itu.

Dalam mencari pengaruh massa partai yang berkampanye termasuk dari partai Islam di pergunakan Media massa, Siaran Berita, Koran ataupun Majalah yang di sebar luaskan sebanyak-banyaknya untuk mempengaruhi rakyat agar memilih jago masing-masing. Termasuk Nahdatul Ulama' mempunyai surat khabar "Duta

